



**Pelatihan Penguatan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Karakter dan Potensi Masyarakat di Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan**

**Sulsalman Moita<sup>1✉</sup>, Tanzil<sup>2</sup>, Syaifuddin S. Kasim<sup>3</sup>, Sarmadan<sup>4</sup>, Sabaruddin Sinapoy<sup>5</sup>**

Sosiologi, FISIP, Universitas Halu Oleo, Indonesia<sup>1,3</sup>

Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Halu Oleo, Indonesia<sup>2,4</sup>

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Indonesia<sup>5</sup>

E-mail : [moitasulsalman@yahoo.co.id](mailto:moitasulsalman@yahoo.co.id)<sup>1</sup>

---

**Abstrak**

Eksistensi Badan Usaha Milik Desa selain menjadi sokoguru perekonomian desa juga dapat mengurangi angka pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja. Problematika yang dihadapi BUMDEs adalah minimnya dana penyertaan yang bersumber dari dana desa dan rendahnya kompetensi pengurus dalam tata kelola BUMDEs. Tujuan dari Program Kemitraan Masyarakat ini adalah: (1) Penguatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan pengurus dan pengelola BUMDEs dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam berbasis karakter dan potensi masyarakat; (2) Penguatan kemampuan manajemen pengelolaan usaha penerima bantuan BUMDEs berdasarkan karakter dan potensi ekonomi masyarakat; dan (3) Menguatnya strategi kolaborasi dan sinergi antara pengurus, pengelola serta masyarakat menerima program BUMDEs sehingga mampu meningkatkan kemandirian, keswadayaan, dan kesejahteraannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode yang dilakukan adalah pelatihan dengan memfokuskan pada penyuluhan dan FGD. Hasil program kemitraan masyarakat adalah: Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas pengurus, pengelola dan penerima manfaat BUMDEs berbasis karakter dan potensi masyarakat, melalui kemampuan manajemen pengelolaan usaha, kolaborasi dan sinergi sehingga BUMDEs dapat menjadi wadah ekonomi desa guna meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat.

**Kata kunci:** tata kelola, BUMDEs, karakter, potensi masyarakat

**Abstract**

*The existence of Village-Owned Enterprises in addition to being the sokoguru of the village economy can also reduce the unemployment rate through job creation. The problems faced by BUMDEs are the lack of participation funds sourced from village funds and the low competence of the management in the governance of BUMDEs. The objectives of this Community Partnership Program are: (1) Strengthening the knowledge and skill capacity of BUMDEs administrators and managers in utilizing the potential of natural resources based on character and community potential; (2) Strengthening the management ability of business management of BUMDEs beneficiaries based on the character and economic potential of the community; and (3) Strengthening the collaboration and synergy strategy between administrators, managers and the community to accept the BUMDEs program so as to increase its independence, empowerment, and welfare. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode yang dilakukan adalah pelatihan dengan memfokuskan pada penyuluhan dan FGD. The results of the community partnership program are: Increasing the knowledge and capacity of bumdes management, managers and beneficiaries based on community character and potential, through business management capabilities, collaboration and synergy so that BUMDEs can become a forum for the village economy to increase village income and community welfare.*

**Keywords:** governance, BUMDEs, character, community potential

---

Copyright (c) 2022 Sulsalman Moita, Tanzil, Syaifuddin S. Kasim, Sarmadan, Sabaruddin Sinapoy

✉ Corresponding author

Address : Universitas Halu Oleo

Email : [moitasulsalman@yahoo.co.id](mailto:moitasulsalman@yahoo.co.id)

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i6.703>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

## PENDAHULUAN

Secara holistik pembangunan nasional selain bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, juga memperkuat eksistensi daerah dengan otonominya dalam bingkai negara kesatuan. Desa merupakan salah satu penyangga utama keberhasilan utama otonomi dan pembangunan daerah. Memperkuat posisi desa melalui kebijakan yang strategis sebagai tonggak kedaulatan secara nasional, merupakan melu untuk dapat berkompetisi secara global.

Realitas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan keadilan sosial (Prodes, 2016).

Lahirnya Badan Usaha Milik Desa merupakan penjawatahan dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 87 menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Eksistensi BUMDes ditengah-tengah masyarakat dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Pombulaa Jaya, merupakan salah satu desa di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan yang mengimplementasikan UU Desa dengan membentuk BUMDes dalam rangka mendorong ekonomi desa sekaligus mengoptimalkan karakter dan potensi sosial ekonomi masyarakat. BUMDes Rajawali yang telah dibentuk selama lima tahun terakhir, dalam program kerjanya mayoritas memanfaatkan alokasi dana desa (DD), dengan dukungan anggaran sebesar 10-15% dari total dana desa (DS) melalui kegiatan: penggemukan sapi, simpan pinjam, dan penyewaan tenda dan kursi.



Gambar 1. Salah satu Program BUMDes Rajawali: Penggemukkan Sapi.

Eksistensi BUMDes Rajawali sebagai lokomotif perekonomian desa, pada umumnya terkendala dengan minimnya anggaran dan fasilitas, serta kapasitas pengelola yang belum memadai, sehingga tak jarang manajemen pengelolaan mengalami hambatan dalam mengoptimalkan penguatan ekonomi rakyat dan pendapatan desa. Setiap tahun, Pemerintah Desa Pombulaa Jaya melalui dana desa (DD), hanya mengalokasikan 75 juta hingga 100 juta untuk modal usaha BUMDes. Bahkan selama 2 tahun terakhir di masa pandemic Covid-19, alokasi dana dikurangi hingga 50 juta karena 40% dari total dana desa digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT). Dampaknya sebagian dari program

BUMDes dalam menggerakkan usaha mikro/kecil/menengah (UMKM), mengalami kendala karena dukungan financial yang kecil serta rendahnya tata kelola pengurus dan warga penerima program, yang berdampak kegiatan menjadi stagnan.

Berdasarkan hal di atas, maka pelatihan penguatan tata kelola BUMDes dengan mengoptimalkan karakter dan potensi masyarakat, menjadi salah satu pilihan guna meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan inovasi sehingga infut-infut ekonomi desa secara kelembagaan dan jejaring dapat dimaksimalkan untuk keberdayaan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan desa tak jarang mengalami paradoks, yakni di satu sisi adalah memenuhi ekspektasi masyarakat agar kesejahteraan, keamanan dan partisipasi warga dapat terpenuhi secara maksimal; namun di sisi lain adalah tanggungjawab untuk mengartikulasikan berbagai program pembangunan mulai dari tingkat atas mulai Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, hingga Pemerintahan Desa.

Positioning pembangunan desa yang paradoks, berpotensi melahirkan benturan-benturan kepentingan yang acapkali dapat merugikan masyarakat yang tidak memiliki akses politik, akses sosial, akses ekonomi, termasuk akses hukum ketika terjadi dispartitas atau konflik kepentingan. Salah satunya adalah pemanfaatan dana desa (DD) dengan jumlah dana sekitar 700-800 juta pertahun, acapkali melahirkan benturan jika pengeloa dana desa terutama Kepala Desa tidak transparan, akuntabel, dan partisipatif. Belum lagi jika dana desa dikelola dengan perilaku KKN dan motif politik yang berhubungan dengan

pemilihan Kepala Desa, sehingga hanya menguntungkan sekelompok orang.

Secara empiris, problematika pengelolaan BUMDes di Desa Pombulaa Jaya adalah terkait dengan karakter masyarakat yang kurang mampu diakomodasi oleh Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes. Karakter masyarakat yang heterogen acapkali berbenturan pada penentuan siapa yang mengelola program, yang tak jarang menimbulkan konflik laten karena yang diberi amanah untuk mengelola adalah orang dekat dengan pengurus/pengelola.

Masalah lain adalah potensi masyarakat terkait dengan program yang menjadi skala prioritas. Faktanya, dari 3 (tiga) program BUMDes Rajawali hanya satu yang dianggap berhasil adalah program penggemukan sapi (Wawancara Sekdes Pombula Jaya, tanggal 28 Mei 2022); sementara 2 program lain yaitu simpan pinjam dan penyewaan kursi dianggap gagal karena minimnya tanggungjawab pengelola program.

Selain problematika karakter dan potensi masyarakat, juga ditemukan masalah pengelolaan BUMDes di lokasi pengabdian yaitu: a. Iklim usaha belum kondusif; keterbatasan informasi dan akses pasar, rendahnya produktivitas (teknologi rendah), keterbatasan modal; b. Rendahnya pengetahuan, keterampilan, jiwa, dan spirit kewirausahaan pengelola; dan c. Minimnya pengetahuan dan semangat kewirausahaan masyarakat sebagai sasaran program BUMDES.

Menurut Permendes No 22/ 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, diketahui bahwa melalui penggunaan dana desa dalam mendukung pengembangan usaha ekonomi desa, terdapat tiga aspek penting penggunaan dana desa untuk pengembangan BUMDES tersebut, yaitu: 1) Permodalan; 2)

Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan; dan  
3) Pengembangan Alat dan Sarana Produksi.

Merujuk pada Permendes dan telaah atas sejumlah masalah yang timbul dalam pengelolaan BUMDes, maka pelatihan penguatan tata kelola menjadi salah satu opsi sehingga pengelola BUMDes diharapkan memiliki perubahan *mindseat*, sikap, perilaku, dan lebih profesional dalam mengelola anggaran dan kegiatan yang bersumber dari dana desa (DD) guna menumbuhkan usaha kecil/menengah, roda perekonomian masyarakat desa, dan membuka lapangan kerja baru.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka tujuan pelaksanaan program kemitraan masyarakat adalah: 1. Meningkatkan kemampuan pengelola BUMDes dalam hal manajemen dan tata kelola yang bermuara pada peningkatan mutu dan kualitas hasil dan produksi dengan memaksimalkan karakter dan potensi masyarakat; 2. Meningkatkan pengetahuan dan moralitas pengelola BUMDes berdasarkan karakter dan potensi masyarakat, seperti kebiasaan/budaya kerja, adaptasi sumber daya alam dan sumber ekonomi, jaringan sosial, dan kelembagaan ekonomi; 3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas dalam manajemen pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif; 4. Mendorong pengelola dan penerima program BUMDes agar dapat membangun sinergis dengan lembaga ekonomi lain, serta mampu menguasai pasar baik pasar lokal, regional, maupun nasional; 5. Melaksanakan program-program BUMDes yang berpihak pada kepentingan rakyat yang paling membutuhkan terutama pemberdayaan masyarakat miskin dan terbukanya lapangan kerja baru.

## **METODE**

Berdasarkan hasil observasi awal pada lokasi Program Kemitraan Masyarakat (PKM), ditemukan bahwa akar permasalahan utama adalah rendahnya tata kelola BUMDes. Atas dasar itu, maka strategi yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan mitra adalah melalui pelatihan tata kelola BUMDes berbasis karakter dan potensi masyarakat, sehingga diharapkan setelah pelatihan pengelola dan penerima manfaat BUMDes memiliki kemampuan inovasi, profesionalitas, moralitas, keterampilan, dan kapasitas dalam memanfaatkan anggaran guna menumbuhkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di desa, serta meningkatkan tumbuhnya lapangan kerja baru.

Beberapa pendekatan yang ditawarkan dalam pelatihan penguatan tata kelola BUMDes di Desa Pombulaa Jaya, antara lain: 1. Sosialisasi kegiatan PKM kepada mitra lokasi (Perangkat Desa, Pengurus BUMDes, Pengelola Program BUMDes, dan warga penerima program BUMDes; 2. Survei lokasi program usaha BUMDes, seperti lokasi penggemukan sapi, koperasi simpan pinjam, dan tempat penyewaan kursi; 3. Pemberian materi pelatihan oleh tim PKM, tanya jawab dengan peserta, FGD dan praktek lapangan untuk mencari solusi bersama dalam upaya meningkatkan kapasitas, pengalaman, dan keterampilan teknis pengurus, pengelola, dan penerima manfaat BUMDes, dengan mempertimbangkan potensi dan karakter masyarakat; dan 4. Rekomendasi yang dihasilkan dalam pelatihan berupa komitmen bersama Pemerintah Desa, pengurus, pengelola dan penerima manfaat BUMDes.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Koordinasi dan Sosialisasi Program Kemitraan Masyarakat Internal

Sosialisasi dilakukan pada mitra program dan kelompok sasaran, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Desa Pombulaa Jaya pada tanggal 21 Juli 2022. Hasil pertemuan selain membahas tujuan PKM sebagai salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tim pengabdian juga memperoleh gambaran tentang dinamika BUMDes Rajawali, komitmen Pemerintah Desa dalam memaksimalkan potensi BUMDes, deskripsi potensi wilayah dan ekonomi desa dalam mendukung program BUMDes, dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya tim PKM bersama Kepala Desa menyetujui waktu pelaksanaan pelatihan.

Koordinasi selanjutnya, dilaksanakan pada BUMDES Rajawali pada tanggal 25 Juli 2022 yang diterima oleh Ketua BUMDes. Dari pertemuan tersebut, tim PKM telah menerima informasi sejauhmana perkembangan dan pelaksanaan program BUMDES, visi misi, tujuan, sasaran dan target Program, tantangan dan kendala yang dihadapi terutama minimnya alokasi anggaran, dukungan Pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program BUMDes.

### Penyediaan Sarana Program

Guna mendukung kegiatan dan Program Kemitraan Masyarakat, tim pengabdian telah menyiapkan langkah-langkah pro aktif, konstruktif, dan inovatif agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan sukses serta berimplikasi pada kehidupan warga atau kelompok sasaran.

Persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan pelatihan dan edukasi,

antara lain: penyiapan instrumen, materi, modul, gambar, alat peraga yang disampaikan pada sesi kegiatan. Sarana lain yang disiapkan adalah *in-focus*, *soundsystem*, kursi, meja, penataan ruang, foto copy materi, seminar kit, konsumsi, dokumentasi kegiatan, dan sebagainya.

Guna memaksimalkan proses pelatihan dan edukasi, tim PKM juga meminta kepada peserta pelatihan, guna menyiapkan data terkait dengan jenis program BUMDes, keadaan pengurus, alokasi anggaran, potensi usaha, serta kontribusi BUMDes untuk pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat.

### Implementasi Program

Implementasi Program Kemitraan Masyarakat (PKM), diawali dengan penyampaian/ distribusi undangan kepada para peserta, yang terdiri dari: Kepala Desa, para perangkat Desa, Pengurus BUMDes, komisaris, dewan pengawas, pengelola kegiatan, dan masyarakat penerima program. Puncak kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, dengan mengambil tempat di Aula Balai Pertemuan Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

Kegiatan dengan tema “Pelatihan Penguatan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Karakter dan Potensi Masyarakat, dihadiri oleh 30 orang peserta. Kegiatan pelatihan dibuka langsung oleh Kepala Desa Pombulaa Jaya (Jafar) dan turut memberikan sambutan Ketua Tim PKM (Dr. Sulsalman Moita, S.Sos, M.Si).

Sesi selanjutnya adalah pemberian materi Pelatihan Penguatan Tata Kelola BUMDes, dengan nara sumber:

1. Dr. Sulsalman Moita, S.Sos, M.Si (Ketua Tim): “Penguatan Kapasitas Pengurus dan

Pengelola BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Desa”.

2. Drs. Syaifuddin Suhri Kasim, M.Si (Anggota Tim): “Identifikasi dan Pemetaan Potensi masyarakat desa dalam mendukung Program BUMDes”.
3. Dr. Tanzil, M.Si (Anggota tim): Model Penguatan Partisipasi Masyarakat Berbasis Karakter dalam Mendukung Program BUMDes.
4. Sarmadan, S.Sos, M.Si (anggota TIM): “Peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wadah UMKM.

Pelatihan yang dilaksanakan selama kurang lebih 6 jam mendapat apresiasi dan respon positif dari peserta. Hal ini dapat dilihat pada banyaknya argumentasi dan pertanyaan peserta yang disampaikan terutama terkait dengan strategi yang perlu dilakukan dalam menguatkan tata kelola BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa. Beberapa pertanyaan yang diajukan peserta pelatihan antara lain:

1. Pertanyaan mengenai rendahnya kualitas sumber daya manusia pengurus dan pengelola BUMDes yang umumnya hanya tamatan SMA dan SMP. Kondisi ini menyebabkan minimnya kemampuan dalam mengelola kegiatan, manajemen usaha, serta akuntabilitas dalam pertanggungjawaban keuangan. Atas pertanyaan tersebut, tim PKM memberikan solusi melalui peningkatan kapasitas pengurus melalui pelatihan life skill, pelatihan pengelolaan usaha dan keuangan, dan pelatihan pemetaan manajemen usaha.
2. Pertanyaan terkait Minimnya alokasi anggaran BUMDes yang hanya bersumber

dari dana desa, menyulitkan pengurus dan pengelola dalam memaksimalkan program yang benar-benar dibutuhkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Atas pertanyaan tersebut, TIM PKM memberikan solusi untuk bermitra dengan lembaga ekonomi eksternal, memperluas jaringan dan kemitraan usaha, serta memanfaatkan peluang market (pasar) melalui teknologi informasi.

3. Pertanyaan bahwa Program BUMDes hanya terbatas pada program-program konvensional seperti penggemukan sapi dan simpan pinjam, dengan kondisi yang terbatas baik dari aspek sumber daya produksi maupun sumber daya manusia. Atas pertanyaan tersebut; TIM PKM menawarkan perlunya inovasi program dan usaha melalui peluang eksternal dengan memanfaatkan karakter dan potensi masyarakat, seperti potensi sumber daya alam dan potensi kesiapan masyarakat untuk menerima perubahan.
4. Saran bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pengurus, pengelola, dewan pengawas dan masyarakat penerima manfaat BUMDes. Warga juga berhadapan tim PKM dapat meneruskan kendala dan tantangan pengelolaan BUMDes kepada pihak-pihak terkait, seperti Pemerintah Daerah. Atas saran tersebut, TIM PKM memastikan bahwa kegiatan ini menjadi rekomendasi yang akan diteruskan kepada pihak-pihak terkait, melalui laporan kegiatan, rilis berita/media, dan diskusi dengan pengambil kebijakan.



Gambar 2. Peserta pelatihan

Selain tantangan dan hambatan, apresiasi positif peserta juga nampak dari beberapa argumentasi dan rekomendasi dalam forum FGD, seperti:

1. Pelatihan Penguatan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Berbasis Karakter dan Potensi Masyarakat, menjadi wahana tukar menukar informasi dan pengalaman peserta dan narasumber, seperti: strategi memanfaatkan potensi wilayah untuk memperkuat program BUMDes, identifikasi potensi ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal yang dapat memperkuat pengembangan BUMDes, revitalisasi BUMDes baik dari aspek pengurus maupun program yang lebih inovatif dan partisipatif.
2. Materi pelatihan yang diberikan narasumber mendekati peserta dengan kebiasaan, sikap, dan tindakan dalam penguatan kapasitas tata kelola BUMDes. Tim PKM banyak menunjukkan bukti-bukti pengelolaan BUMDes yang berhasil dalam mendorong kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat.



Gambar 3. Pemberian materi oleh TIM PKM

### **Monitoring dan Evaluasi**

Langkah selanjutnya setelah implementasi program adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan secara intensif dan terukur sejauhmana program-pelatihan dijalankan dengan baik sesuai dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Variabel untuk monitoring program parameternya adalah pada sesi pelaksanaan pelatihan, yakni sejauh mana kemampuan peserta dalam forum FGD memahami esensi penguatan tata kelola BUMDes berbasis karakter dan potensi masyarakat.

### **SIMPULAN**

Tujuan dari Program Kemitraan Masyarakat ini adalah: (1) Penguatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan pengurus dan pengelola BUMDes dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam berbasis karakter dan potensi masyarakat; (2) Penguatan kemampuan manajemen pengelolaan usaha penerima bantuan BUMDes berdasarkan karakter dan potensi ekonomi masyarakat; dan (3) Menguatnya strategi kolaborasi dan sinergi antara pengurus, pengelola serta masyarakat menerima program BUMDes sehingga mampu meningkatkan kemandirian, keswadayaan, dan kesejahterannya. Dari kegiatan ini dapat dilihat hasil program kemitraan masyarakat adalah:

Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas pengurus, pengelola dan penerima manfaat BUMDES berbasis karakter dan potensi masyarakat, melalui kemampuan manajemen pengelolaan usaha, kolaborasi dan sinergi sehingga BUMDes dapat menjadi wadah ekonomi desa guna meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Ketua LPPM Universitas Halu Oleo, Dekan FISIP Universitas Halu Oleo, Kepala Desa Pombulaa Jaya, Pengurus LPPM Rajawali atas petunjuk, bimbingan dan perkenannya, sehingga kegiatan Program Kemitraan Masyarakat ini dapat berlangsung dengan sukses.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonymous. Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa, [Http://www.keuangandes.com/pendekatan-utuh-penguatan-kelembagaanekonomi-des/](http://www.keuangandes.com/pendekatan-utuh-penguatan-kelembagaanekonomi-des/), Tanggal 4 Mei 2017, Jam 10.30 Wib.
- Malik, Mulyadin. 2017. Membangun Daya Saing Desa Melalui Pengembangan Bumdes (Antara Peluang Dan Tantangan Di Era Pasar Bebas). Makalah Disajikan Pada Kuliah Umum Mahasiswa Fisip Unihaz Bengkulu, Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.
- Permendesa Pdt No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Program Desa Lestari. 2016. Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa. Yogyakarta: Yayasan Penabulu.
- Susilo, Budi Dan Komara, K. Eko. 2016. Baseline Research “Membangun Gerakan Desa Wirausaha”. Yogyakarta: Yayasan Penabulu.